

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 46**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan persampahan dan kebersihan merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara umum, yang berdasarkan peraturan-perundangan terhadap pelayanan tersebut dapat dikenakan retribusi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat, sekaligus guna mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu

memperbaharui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan/kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi atas penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelayanan:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/tempat pemerosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tempat yang dapat digunakan masyarakat secara umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis bangunan/kegiatan, lokasi/kelas jalan, dan jumlah orang/karyawan.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan dengan mempertimbangkan besar biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

- (3) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemungutan pendapatan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATACARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya

pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 15

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 16

Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF,
DAN TATACARA PENAGIHAN

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 24

- (1) Untuk efektifnya pelayanan persampahan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemerintah Desa untuk melaksanakan pelayanan

persampahan yang tidak dapat dilalui mobil angkutan persampahan.

- (2) Pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan peralatan persampahan (TPS, gerobak pengangkut, dan sejenisnya) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Penunjukan Petugas Sampah di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan Petugas Sampah oleh Kepala Desa, sekaligus sebagai petugas pemungut retribusi di tingkat desa.
- (3) Pemungutan retribusi sampah oleh Petugas Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi pemungutan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Hasil pemungutan retribusi oleh Petugas Sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Pemerintah Desa, selanjutnya oleh Kepala Desa disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 26

- (1) Hasil pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh Petugas Sampah di tingkat desa, dikembalikan kepada Pemerintah Desa, dengan persentasi sebagai berikut:
 - a. Untuk Kas Desa 60 % (enam puluh persen);
 - b. Untuk Pemerintah Desa 40 % (empat puluh persen).

- (2) Pengembalian kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai operasional petugas sampah, biaya pemungutan retribusi, dan biaya pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelayanan persampahan pada Kelurahan yang tidak dapat dilalui oleh mobil angkutan sampah, dilaksanakan oleh Petugas Sampah yang ditunjuk oleh SKPD yang melaksanakan urusan pelayanan kebersihan/persampahan.
- (2) Petugas Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), sekaligus juga ditunjuk sebagai pemungut retribusi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi oleh Petugas Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Kepada Petugas Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan biaya operasional sebanyak 40% (empat puluh persen) dari hasil pemungutan retribusi, yang dialokasikan pada DPA SKPD yang melaksanakan urusan kebersihan/persampahan.

Pasal 28

- (1) Waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dilakukan mulai pukul 20:00 wita sampai dengan 07:00 wita.
- (2) Pembuangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. sampah wajib dibungkus dengan kantong plastik atau sejenisnya;
- b. sampah ditempatkan pada bak sampah yang tersedia atau pada halaman rumah masing-masing yang dilalui mobil atau gerobak pengangkut sampah.

Pasal 29

- (1) Pelayanan persampahan yang dilayani oleh Pemerintah Daerah secara rutin adalah jenis sampah rumah tangga.
- (2) Untuk sampah khusus hanya dapat dilayani atas permintaan yang berkepentingan, dan dikenakan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembayaran retribusi sampah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan langsung ke Dinas Pendapatan Daerah, atau melalui Petugas Sampah Desa/Kelurahan, dan diberikan tanda bukti lunas retribusi yang diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pengangkutan oleh mobil/gerobak pengangkut sampah baru dapat dilakukan setelah Pemohon menunjukan bukti lunas retribusi sampah khusus yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Setiap orang pribadi atau Badan dilarang:

- a. meletakkan dan/atau membuang sampah di sembarang tempat;
- b. membuang sampah diluar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- c. membuang sampah dengan cara yang tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan/atau

- d. membuang atau menempatkan sampah khusus di tepi jalan umum, dan tidak dilakukan pengangkutan sampai dengan jam 09:00 wita.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang pribadi atau Badan yang terbukti karena salahnya dan/atau karena lalainya melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 34

Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2005, Seri C Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2011

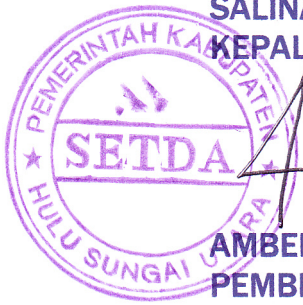
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H.RISNADY BAHARUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 46**



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

Lampiran
Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
Nomor 46 Tahun 2011
Tanggal 29 Desember 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1.	Perkantoran: Dihitung berdasarkan jumlah karyawan: > 1 s.d. 20 orang > 21 s.d. 50 orang > 51 s.d. 100 orang > Di atas 100 orang	Rp. 20.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 150.000/bulan
2.	Rumah Tangga Dihitung berdasarkan kelas jalan: > di tepi jalan protokol > di tepi jalan lingkungan > di dalam gang	Rp. 5.000/bulan Rp. 3.000/bulan Rp. 2.000/bulan
3.	Pertokoan: c. Pertokoan di luar kawasan pasar: > dalam wilayah ibukota kabupaten (wilayah kelurahan, desa Palampitan Hulu, Palampitan Hilir, dan Hulu Pasar, dan sekitarnya) > di luar ibukota kabupaten (di wilayah kecamatan) d. Pertokoan di dalam kawasan pasar/terminal: > dalam kawasan Pasar Amuntai	Rp. 10.000/bulan Rp. 5.000/bulan Rp. 15.000/bulan

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
	<ul style="list-style-type: none"> > dalam kawasan Pasar Kecamatan > dalam kawasan Terminal Pasir Mas > dalam kawasan Terminal Palampitan 	Rp. 5.000/bulan Rp. 5.000/bulan Rp. 5.000/bulan
4.	Rumah Makan <ul style="list-style-type: none"> ➤ dalam ibukota kabupaten ➤ di luar ibukota kabupaten 	Rp. 15.000/bulan Rp. 10.000/bulan
5.	Warung/Rombong	Rp. 7.000/bulan
6.	Hotel / Penginapan	Rp. 40.000/bulan
7.	Rumah Sakit	Rp. 500/hari/ Pasien rawat inap
8.	Tempat Hiburan <ol style="list-style-type: none"> 1) Permanen 2) Insidentil / Pertunjukan 3) Pameran, diselenggarakan selama: <ul style="list-style-type: none"> > 1 s.d. 3 hari > 4 s.d. 7 hari > 8 s.d. 11 hari > 12 s.d. 15 hari > 15 s.d. 18 hari > 19 s.d. 22 hari > 23 s.d. 26 hari > 27 s.d. 30 hari > Lebih dari 30 hari 	Rp. 25.000/bulan Rp. 50.000/hari Rp. 250.000/keg. Rp. 500.000/keg. Rp. 750.000/keg. Rp. 1.000.000/keg. Rp. 1.250.000/keg. Rp. 1.500.000/keg. Rp. 1.750.000/keg. Rp. 2.000.000/keg. Rp. 2.500.000/keg.
9.	Industri <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecil ➤ Sedang ➤ Besar 	Rp. 5.000/bulan Rp. 10.000/bulan Rp. 50.000/bulan

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
10.	Industri Pengolahan Karet	Rp.500.000/bulan
11.	Kontraktor	Rp. 0,5 (setengah permil) dari nilai kontrak
12.	Perbengkelan	Rp. 10.000/bulan
13.	Usaha Angkutan	Rp. 10.000/tahun
14.	Sampah Khusus	Rp. 25.000/0,5M ³

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI